VISI POLITIK PEMBEBASAN GEREJA BERHADAPAN DENGAN KOLONIALISME

F. Hasto Rosariyanto, SJ

Pengantar

Memperhatikan dinamika politik yang berkembang di tanah air, terutama dalam tahun terakhir ini, masalah HAM telah semakin gencar menjadi isu politik, seirama dengan meningkatnya tuntutan demokratisasi. Fenomena itu di samping merupakan kelanjutan gelombang politik yang berdimensi global dan menyejarah, juga merupakan buah pemerataan pendidikan.[1]

Tidak bisa disangkal bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menjadi sebuah lembaga yang amat populer, sebuah nama institusi yang akhir-akhir ini paling sering muncul entah di media cetak maupun elektronik. Banyaknya kelompok, entah perorangan atau organisasi, yang datang mengadukan persoalan mereka dapat menjadi petunjuk bahwa lembaga ini telah berkembang dan mendapat kredibilitas yang tinggi. Masyarakat mulai belajar menilai lembaga manakah yang memang memperjuangkan nasib mereka.

Beberapa waktu yang lalu, tatkala masalah pelanggaran HAM dikaitkan dengan syarat bantuan ekonomi, para politikus dan pejabat pemerintah menolak mentah-mentah. Adapun dalih mereka adalah bahwa HAM itu produksi budaya Barat sementara Indonesia memiliki latar belakang budaya yang sama sekali berbeda. Pembenaran ini tidak sama sekali keliru. Prof. H.A. Mansyhur, SH.MS., memberi catatan sebagai berikut: "... kita harus jujur dan mengakui pula bahwa banyak kaidah-kaidah HAM yang kita tegakkan bersumber kepada budaya Barat. Kita hormati dan kita tegakkan karena di dalamnya sesuai dengan nilai-nilai universal dan kemanusiaan, sehingga tidak ada masalah"[2]. Dengan kata lain perjuangan untuk menegakkan HAM bukan lagi soal moral dan hukum semata, tetapi merupakan barometer utama untuk penyelesaian politik praktis[3].

Deklarasi Hak Asasi Manusia sendiri sudah diterima oleh Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Tahun ini deklarasi tersebut sudah berusia 50 tahun. Oleh karena itu, maraknya diskusi di sekitar HAM dan berkembangnya kesadaran rakyat Indonesia akan hak-hak mereka yang asasi merupakan kado yang amat bernilai. Tulisan ini tidak mau mengupas soal HAM di Indonesia selama 50 tahun kemerdekaan, juga tidak mau memberi penilaian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang keji, kejam, dan bengis yang terjadi di Indonesia semasa penjajahan Belanda. Tulisan ini hanya mau melukiskan salah satu visi misioner Gereja Katolik di Indonesia pada awal abad XX di dalam menyikapi suasana zamannya. Visi misoner tersebut merupakan pengejawantahan dari Kabar Gembira yang ingin diwartakan oleh Gereja Katolik bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Figur sentral dari pelaksana visi misioner tersebut tidak bisa dilepaskan dari seorang misionaris Belanda yang bernama Frans van Lith, SJ.

Politik Kolonialis Belanda

Sebagai daerah jajahan, situasi politik di Indonesia tergantung dari gejolak politik di Belanda dan di Eropa pada umumnya. Sesuai dengan pandangan politik yang berlaku, wilayah jajahan merupakan sumber keuangan yang dapat dikeruk kekayaannya entah dengan jalan atau cara bagaimana. Politik *cultuurstelsel* memperkaya negeri induk, Belanda tetapi telah mempermiskin dan bahkan telah merenggut ribuan hidup orang Jawa. Politik liberal yang menggantikan politik *cultuurstelsel* tidak juga memperbaiki keadaan. Penduduk wilayah jajahan tetap tinggal menjadi sapi perahan.[4]

Politik pemerintahan Belanda terhadap wilayah jajahan berubah lagi pada akhir abad XIX atau awal abad XX. Semakin besarnya pengaruh koalisi partai-partai kristen turut menentukan perubahan politik ini. Aliansi partai-partai kristen menuntut diterapkannya nilai-nilai kristen dalam kebijakan politik di daerah jajahan; inilah yang kemudian dikenal sebagai Politik Etika. Politik Etika ini sangat penting artinya karena memberi perhatian khusus pada peran penduduk pribumi di dalam pemerintahan. Menurut gagasan ini, daerah jajahan harus diatur demi penduduk pribumi, dan bukan demi "negeri induk": *a government of the Indies for the Indies.* Dalam pidato kenegaraan pada tanggal 17 September 1901, secara spesifik Ratu Wilhelmina menyebut "peran moral pemerintah Belanda untuk mempromosikan budaya dan toleransi di tengah-tengah kebhinekaan suku di wilayah jajahan".[5] Tanpa meng-

ingkari adanya hambatan, berkat Politik Etika ini jumlah sekolah negeri berlipat, rumah sakit dan pelayanan-pelayanan kesehatan diperbaiki.

Sikap Gereja Katolik

Sementara para misionaris katolik berhasil mengadakan kontak dengan penduduk pribumi di luar Jawa, pemerintah kolonial Belanda bersikukuh untuk tidak memberi peluang yang sama di Jawa. Ketakutan akan terganggunya stabilitas – *rust en orde* – membuat mereka sangat berhati-hati. Meski larangan tidak pernah dicabut, dengan berlakunya Politik Etika pemerintah Belanda tidak menghalangi terjalinnya kontak awal antara Gereja Katolik dengan orang-orang Jawa. Dengan ditugaskannya secara resmi dua misionaris Jesuit Belanda – Frans van Lith dan Hoevenaars – untuk bekerja di antara orang Jawa, tonggak baru sejarah Gereja Katolik di Indonesia pun dimulai. Pelayanan terhadap orang-orang Eropa tidak pernah ditinggalkan, tetapi perhatian terhadap orang Jawa semakin mendapatkan prioritas.

"Kemajuan" adalah kata kunci dari Politik Etika. Dari sudut pandangan pemerintah Belanda, "maju" juga berarti di bawah kekuasaan Belanda dan menurut model Barat.[6] Menurut dasar teoretis Politik Etika, penduduk pribumi-lah yang menjadi pusat perhatian. Di dalam pelaksanaannya tampaklah bahwa segala sesuatunya ditentukan dan diputuskan oleh pemerintah kolonial, seperti dengan amat jelas dirumuskan: "chez vous, pour vous, sanz vous".[7] Pribumi sama sekali tidak dilibatkan. Pemerintah Belanda merasa lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan pribumi, dan karena itu merekalah yang menentukan.

Frans van Lith tidak memprotes pendekatan pemerintah Belanda yang amat paternalistik itu. Politik Etika itu pada dirinya amat baik karena justru berpihak pada pribumi. Daripada menciptakan konflik yang tidak perlu ia mencoba menerjemahkan visi misionernya dalam tataran *policy* pemerintah yang berlaku. Dalam pandangan Frans van Lith gagasan dasar Politik Etika adalah *memajukan Nederlands Indië* dan pemerintah kolonial *meninggalkan segala bentuk eksploitasi*. Sejarah menunjukkan bahwa terjemahan visi pendidikan van Lith bisa berjalan sesuai dengan *policy* pemerintah, tetapi terjemahan visi politiknya ternyata bertentangan langsung dengan kepentingan pemerintah Belanda di Indonesia. Interesse misioner berlawanan dengan kolonialisme.

Pendidikan sebagai Sarana Menuju Kemajuan dan Persamaan Hak

Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pendidikan tertuang dalam Deklarasi HAM pasal 26. Di sana dirumuskan bahwa tujuan pendidikan antara lain untuk perkembangan pribadi, kebebasan asasi, mempertinggi saling pengertian, dan rasa persahabatan antara semua bangsa. Visi misioner van Lith tentang pendidikan pribumi lahir dari pengalamannya mendalami budaya Jawa.[8] Semakin ia mendalami bahasa, budaya, dan sejarah Jawa semakin ia dibuat kagum akan kebesaran budaya Jawa di masa lalu. Oleh karena itu, lewat bermacam sarana dan kesempatan Frans van Lith mengajak orang asing dan pribumi untuk menyadari kebesaran budaya Jawa ini.

Visi pendidikan yang dicanangkan oleh van Lith pertama-tama adalah pembentukan karakter tanpa menomorduakan prestasi studi.[9] Karena "kemajuan" – yang juga berarti mendapat pendidikan – sedang menjadi kerinduan orang-orang pribumi, pendidikan guru mendapat prioritas utama. Mereka yang berprestasi didorong untuk meneruskan studi lebih lanjut. Penguasaan bahasa Belanda dinilai mutlak perlu agar pribumi dapat mengenal cakrawala lebih luas dan dapat mengikuti perkembangan. *Policy* pemerintah untuk menyebarluaskan pendidikan perlu disertai dengan tersedianya pendidik yang bermutu dan berkarakter.

Visi misioner van Lith dalam bidang pendidikan menempatkan kemajuan Nederlands Indië sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, jenis-jenis sekolah yang ditangani oleh Gereja juga harus mengacu pada persoalan sejauh mana sekolah-sekolah itu menjawab kebutuhan Nederlands Indië.[10] Bagi Frans van Lith persoalan pendidikan tidak terletak pada siapa yang dilayani: orang Eropa atau pribumi. Visi misionernya sudah jelas. Gereja harus memberi prioritas pelayanan kepada mereka yang akan turut membantu kemajuan Nederlands Indië, entah itu orang Eropa entah itu pribumi.

Pengabdian Frans van Lith yang sedemikian total bagi pendidikan pribumi telah membuat dirinya dikenal di kalangan pemerintahan dan menjadikan dirinya sumber yang dapat dipercaya. Sumbangan Gereja bagi kemajuan pendidikan pribumi tampak dari terus bertambahnya jumlah sekolah misi sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tidak jarang sekolah misi mendahului hadirnya sekolah negeri. Tidak sedikit pula para guru lulusan Sekolah Pendidikan Guru misi mengabdikan diri di sekolah-sekolah negeri.

Visi Politik: Keberpihakan kepada Pribumi

Secara implisit, "memerintah negerinya sendiri" merupakan tujuan akhir dari kebijakan Politik Etika.[11] Gagasan ini pulalah yang terkandung di dalam visi misioner van Lith di bidang politik: pemerintah kolonial harus mempersiapkan orang-orang pribumi untuk memerintah negaranya. Keterlibatan politik Frans van Lith tidaklah mulai dari awal kegiatan misionernya, namun tetap konsisten dengan visi misionernya, yaitu memprioritaskan peran pribumi dalam percaturan kehidupan dan kemajuan bangsanya.[12]

Politik Etika telah memberi peluang bagi lahirnya kesadaran berpolitik di antara orang-orang Indonesia. Perkumpulan-perkumpulan politik pun bermunculan. Gubernur Jendral A.F. van Idenburg (1909-1916) dan J.P. van Limburg Stirum (1916-1921) memiliki pandangan politik yang searah sehingga meniupkan angin optimis di kalangan para nasionalis. Di dalam suasana politik yang demikianlah Frans van Lith terlibat dalam percaturan politik sebagai anggota *Komisi untuk Revisi Undang-Undang* mewakili masyarakat Katolik.[13] Dari pengalaman keterlibatan langsung itulah ia kemudian menguraikan pandangan politiknya selaku seorang misionaris di Indonesia.

Pengalaman perjalanan dinas ke Philipina mematangkan keberpihakan total Frans van Lith kepada pribumi.[14] Sementara itu, tampak bahwa visi misionernya dalam bidang pendidikan yang berorientasi kepada kemajuan pribumi ditangkap betul oleh para anak didiknya. Meskipun mereka dididik secara Barat oleh orang-orang Barat, keprihatinan mereka untuk berbuat sesuatu bagi kemajuan bangsanya tidak pernah luntur. Beberapa dari mereka bahkan akan terlibat aktif dalam perjuangan politik, juga setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945.[15]

Pertama-tama Frans van Lith mengusulkan sebuah bentuk pemerintahan desentralisasi untuk Indonesia. Alasannya antara lain bahwa pemerintah di Belanda tidak mengenal secara benar realita yang hidup di Indonesia. Sering terjadinya kesalahpahaman atas isu-isu politik yang penting memperkuat alasan tersebut.[16] Kemudian Frans van Lith memperlihatkan bagaimana penduduk pribumi telah begitu lama menderita di bawah pemerintahan kolonial. Pemerintah kolonial Belanda yang mengambil alih wilayah jajahan Indonesia dari tangan VOC praktis hanya melanjutkan penindasan. Dengan cara yang sama pemerintah kolonial Belanda memperlakukan orang-orang Indonesia sebagai objek perdagangan. Selama lebih dari seratus tahun (1800-1920) hubungan

antarmereka tidak pernah berubah, tetap tinggal relasi antara pemberi kerja dan pekerja, antara penindas dan tertindas, antara orang asing dan pribumi.[17] Menurut Frans van Lith kerjasama hanya akan mungkin kalau pemerintah Belanda meninggalkan bentuk relasi diskriminatif tersebut dan memulai suatu bentuk hubungan baru yang berdasar atas persahabatan antara dua saudara.[18]

Frans van Lith mengusulkan bentuk pemerintahan desentralisasi karena ia berpendapat bahwa orang-orang Indonesia belum siap untuk memperoleh *self-government*, pemerintahan sendiri. Tanggung jawab pemerintah Belandalah untuk mempersiapkan mereka, dan itu berarti dengan memberi kesempatan kepada orang-orang pribumi turut ambil bagian di pemerintahan. Adapun dasar dari pemerintahan bersama yang diusulkan oleh Frans van Lith adalah *solidaritas*. Pemikiran yang melatarbelakangi dasar pemikiran itu adalah adanya perbedaan kepentingan – bahkan berlawanan – antara para nasionalis dengan pemerintah kolonial Belanda. Menurut Frans van Lith perbedaan itu tidak perlu membawa ke suatu permusuhan karena masing-masing membutuhkan dukungan pihak yang lain:

> *"Di dalam setiap perbedaan kepentingan sebenarnya selalu ada satu prinsip dasar; untuk mencapai kepentingan bersama itu kita saling bergantung, yang satu tergantung dari yang lain. Rumusan itu saya pelajari dari prinsip sosial umat Katolik Belanda, yaitu: solidaritas. Basis dari usulan saya ini tidak lain adalah cinta kristiani. Itulah panggilan setiap orang, itu pula panggilan setiap misionaris."*[19]

Usulan Frans van Lith tentang perlunya pemerintahan bersama yang dialamatkan kepada para pimpinan partai politik di Belanda juga dikarenakan perubahan yang terjadi di Indonesia. Berkat Politik Etika, pendidikan menjangkau masyarakat luas juga kalau masih sebatas kelompok-kelompok menengah. Namun, tidak bisa disangkal bahwa berkat pendidikan itu, mentalitas orang-orang Indonesia juga berubah dan berpandangan maju. Frans van Lith mengingatkan kalau para politikus Belanda tidak mempertimbangkan perubahan ini, bisa-bisa mereka akan diusir secara paksa dari bumi Indonesia:

> *"Banyak orang di negeri Belanda tidak mengenal situasi real di Indië. Mereka mengira bahwa tak sesuatu pun berubah, dan itu keliru. Apa yang ada sekarang, tidak akan selalu demikian. Yang sekarang lemah, akan menjadi kuat; yang sekarang kuat, akan menjadi lemah. Sebuah era baru dan dunia baru sedang datang, dan orang yang bijak seharusnya mempersiapkan diri."*[20]

Frans van Lith sadar bahwa posisinya bisa dinilai berlebihan oleh pihak pemerintah kolonial. Ia bahkan menambahkan bahwa orang Jawa memang suka damai, tetapi itu baru akan berlaku sejauh hak-hak mereka dijamin dan keluhan-keluhan mereka didengarkan. Kalau tidak, pemberontakan tidak akan terelakkan lagi.[21] Sebagai seorang misionaris yang sudah lama hidup dan tinggal di antara orang Jawa, ia mengakui bahwa ia tidak bisa netral lagi. Kalau relasi antara pemerintah kolonial dan penduduk pribumi terus memburuk, para misionaris dan Gereja Katolik harus mengambil posisi, dan mereka akan berpihak kepada pribumi.[22] "Berpihak kepada pribumi" tidak perlu diartikan memusuhi orang Belanda. Yang dilawan oleh Gereja adalah kelobaan dan kecongkakan, sikap kolonialis yang keras kepala dan tidak mau berubah:

> *"Masa dominasi ras putih sudah berakhir. Tidak untuk selamanya seorang kulit putih bisa bertahan hidup di hadapan 100.000 penduduk Asia. Hanya karena sikap arogan-lah mereka menindas orang Jawa melulu karena mereka itu Jawa. Hormatilah hak-hak penduduk pribumi kalau kamu ingin hak-hakmu juga diakui. Di dalam Gereja Kristus tidak ada Yahudi, Romawi, atau Yunani. Oleh karena itu, juga tidak ada Belanda atau Jawa... Mulai dari sekarang orang Belanda, Indo, dan Jawa harus hidup berdampingan sebagai saudara. Kalau tidak, tidak lama lagi mereka akan terpecah-belah."*[23]

Apabila benar-benar terjadi pemberontakan, Frans van Lith memperkirakan akan terjadi juga perpecahan di antara para misionaris. Oleh karena itu, ia mengajak rekan-rekan misionaris untuk menentukan sikap secara bijaksana. Para misionaris dan Gereja harus belajar dari apa yang telah terjadi di Philipina. Gereja tidak boleh menggantungkan diri pada pemerintah kolonial, dan Gereja tidak boleh menghalangi gerakan-gerakan nasionalis menuju kemerdekaan.[24] Bahkan, Frans van Lith juga mengajak rekan-rekan misionaris untuk memberi simpati dan menggabungkan diri dengan sepenuh hati kepada kepentingan penduduk pribumi. Sebab dengan memilih hidup sebagai seorang misionaris, sebenarnya masyarakat pribumi itu telah menjadi mempelainya. Di dalam penghayatan hidupnya seorang misionaris haruslah menganggap orang-orang pribumi itu sebagai anak-anaknya dan ia sendiri sebagai ayah mereka:

> *"Misionaris telah meninggalkan tanah kelahiran, famili, dan kerabatnya untuk menyatukan diri dengan komunitas kristen. Kepada mereka inilah ia dipanggil untuk mencurahkan cintanya, kepada*

mereka inilah hatinya diserahkan. Ia harus setia kepada cintanya, dan karena itu seluruh hatinya diberikan kepada mereka ini."[25]

Visi misioner Frans van Lith dalam bidang politik dinilai sebagai pandangan yang diskriminatif, sosialis, dan bahkan *racist* oleh para politikus Belanda di Indonesia. Oleh orang-orang Katolik dan beberapa misionaris visi politiknya dipandang hanya menyulitkan perjuangan dan relasi mereka dengan pihak pemerintah kolonial.[26] Mengamati bermacam pendapat dan posisi yang muncul di antara para misionaris, Pater J. van Rijckevorsel, seorang misionaris yang aktif dalam bidang sosial dan penasihat *Indische Katholieke Partij* menyimpulkan bahwa kalau Gereja dan para misionaris melawan visi politik Frans van Lith mereka hanya akan kehilangan kontak dengan penduduk pribumi dan dukungan mereka.[27]

Penutup

Visi misioner Frans van Lith dalam bidang politik jelas-jelas berseberangan dengan kebijakan politik pemerintah kolonial. Figur Frans van Lith yang sudah lebih dahulu dikenal sebagai pejuang pendidikan pribumi membuat pandangan politiknya bergema jauh lebih luas. Gerakan nasional merasa mendapat dukungan. Gereja Katolik di Jawa yang perkembangannya tidak bisa dilepas dari peran bekas para muridnya pun semakin mantap dalam orientasinya, yakni berjuang bersama para nasionalis untuk memperoleh kemerdekaan. Visi misioner Frans van Lith dalam bidang politik telah membuat Gereja Katolik di Indonesia menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjuangan rakyat Indonesia menuju kemajuan dan kebebasan.

DAFTAR TULISAN-TULISAN FRANS VAN LITH

Tulisan yang sudah dipublikasikan:

1904 "Toediening van het Heilig Vormsel te Moentilan in de Javanenmissie", *Berichten uit Nederlandsch Oost Indië* II, 46-52.

1918 De Inlandsche Normaalschool het bolwerk der Inlandsche Taalcultuur, *Katoliek Schoolblad*, 30 Juli, 1-6.

1920 Mijn standpunt verklaard, *De Java-Post* 18, 295-296.

1921 Ons Onderwijs, *De Java-Post*, 19, 194-195.

1921 Pater J. Mertens SJ, *St. Claverbond* 33, 131-137.
1921 De vertaling van het 'Onze Vader' in het Javaansch, *Studiën* 53/96, 353-365, 405-417.
1921 De vorming van de Javaanse geestelijkheid, *Het missiewerk* III, 72-81.
1922 Een vervolg op de vertaling van het 'Onze Vader', *Studiën* 54/97, 293-300.
1922 De godsdienst der Javanen, *St. Claverbond* 34, 193-196.
1922 Hoe maken wij den Javaan Christen, *St. Claverbond* 34, 66-71.
1922 Mijn Manila-reis, *Mededeeling van de Nederlandsche Provincie*, 30-34.71-76.107-111.
1922 De politiek van Nederland ten opzichte van Nederlandsch-Indië, *Studiën* 54/98, 280-297.323-346.
1923 De geschiedenis en ontwikkeling der katholieke missie, 1898-1923, dlm: Bas, W.G.van (ed.), *Gedenkboek 1898-1923, Uitgegeven ter gelegenheid van are majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden, 6 September 1923*, Voorschoten, 325-332.
1923 Hoe kan het onderwijs de missie dienen?, dlm: Hermus, A. – A. de Wit (eds.), *Eerste Internationaal Missiecongres in Nederland*, Utrecht, 80-103.
1924 Het gebed van Ardjoena tot Ciwa, *Studiën* 56/101, 362-375.
1924 Het Katholieke onderwijs op Java, *De Java-Post* 22, 326-328.337-339.
1924 Het Koloniaal Onderwijs-Congres, *DJAWA* 4, 154-155.
1924 De nationale spraakkunst, *DJAWA* 4, 263-267.
1941 Uit nagelaten geschriften ..., *St. Claverbond* 53, 1-3.121-124.

Tulisan yang masih dalam bentuk manuskrip:

1. *Di Arsip Provinsi Indonesia (di Semarang):*
   - Aantwoord op vragen van het Koloniaal Onderwijs-Congres in Nederland 1916
   - De Herziening der Lager Onderwijs
   - Het doel van het Katholieke Bijzonder Inlandsch Onderwijs
   - Het Indische Kind Opvoeding
   - De Muloschool in haar betrekking tot de verschillende volksgroepen in Ned. Indië
   - Opgaven omtrent de R.K. Kweekschool te Moentilan
   - Opvoeding tot autonomie
   - Over het regeringsvoorstel tot herziening bestuurwijze van Indië
   - Raden Larang en Raden Sumana

2. *Di Arsip Jesuit Provinsi Belanda (di Nijmegen):*
   - Aan Zyne Eminentie Kardinaal van Rossum
   - De casus van het Javaansche huwelijk
   - De geschiedenis der Katholieke Java-missie
   - Het Javaansche huwelijk in verband met besnijdenis
   - Kjahi Sadrach. Eene les voor ons uit de Protestantische zending van Midden-Java
   - Leeren uit de Filippijnen
   - Over Javaansche bedienden en doerians
   - Toelichting op het missiewerk op Java
3. *Di Archivum Romanum Societatis Iesu (di Roma):*
   - De besnijdenis
   - De besnijdenis op Java
   - Het geheim van den Javaan

CATATAN

1 Hermawan Malik dan Bambang Parianom, "HAM dan Pluralisme Agama," dalam Anshari Thayib dkk. (eds.), *HAM dan Pluralisme Agama*, Surabaya, 1997, hlm. 39. Garis bawah dari saya.

2 H.A. Mansyhur, "HAM dan Integritas Nasional (Sebuah Harapan)," dalam *Ibidem.*, hlm. 15

3 *Bdk.* Victor I. Tanja, "HAM dan Pluralisme Agama (Sebuah tinjauan teologi kristiani)," dalam *Ibidem.* hlm. 84

4 *Lihat* D.W. van Welderen-Rengers, *The Failure of a Liberal Colonial Policy Netherlands East Indies, 1816-1830*, The Hague, 1947, hlm. 13.

5 *Bdk.* W.H. van Helsdingen, "De staatkundige ontwikkeling," dalam H. Baudet, dan I.J. Brugmans (eds.), *Balans van Beleid*, Assen, 1961, hlm. 188; Horst Lademacher, *Geschiedenis van Nederland*, Utrecht, 1993, hlm. 359.

6 *Bdk.* E. Locher Scholten, *Ethiek in fragmenten. Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische Archipel*, Utrecht, 1981, hlm. 121, 176: "The new colonial policy was known then as the Ethical Policy: active efforts to bring progress to the country and people of the Indonesian archipel, under the Dutch authority and according to the western model."

7 Bdk. H. Colijn, *Koloniale Vraagstukken van Heden en Morgen*, no date, hlm. 95, 124; J.H. Boeke, *De Gids* (1940), hlm. 27-34.

8 *Lihat* F. van Lith, "Het gebed van Ardjoena tot Ciwa," *Studiën* 56/101 (1924), 373.

9 Uraian mengenai visi dan program pendidikan van Lith terdapat dalam "Plan en werkwijze der Java-missie" setebal 20 halaman yang dikirmkan kepada Pimpinannya. Rencana dan program ini ditulis pada bulan Juli 1902.

10 Surat F. van Lith kepada Pater Schmedding. Katwijk, 4 April 1922. Archief Nederlandse Provincie Jezuieeten (ANPJ), Map 169, fasc. III, no. 17; Jos Hoeberechts kepada Pater Provinsial [C. Raaijmakers]. Yogyakarta, 22 November 1921.

11 *Bdk.* Martien Kuitenbrouwer, *Nederland en de opkomst van het moderne imperialisme*, Amsterdam, 1985, hlm. 101; E. Locher Scholten, *op cit.*, hlm. 121.

12 "Het Binnenhof," 1-3 September, 1949, hlm. 3, 3, dan 7.

13 *Lihat* Eduard J.M. Schmutzer, *Dutch Colonial Policy and the Search for Identity in Indonesia*, 1920-1923, Leiden, 1977, hlm. 65.

14 *Lihat* F. van Lith, "Mijn Manila-reis," in *Mededeelingen van de Nederlandsche Provincie*, 1922, hlm. 30-34, 71-76 dan 107-111.

15 *Lihat* Y. Adisubrata, (ed.), *I.J. Kasimo. Hidup dan Perjuangannya*, Gramedia-Jakarta, 1980.

16 *Lihat* F. van Lith, "De politiek van Nederland ten opzichte van Nederlandsch-Indië," *Studiën* 98 (1922), 281-297, 323-346; L. Hebrans, "Decentralisatie in Nederlandsch-Indië," *Studiën* 37/63 (1904) 63-81.

17 *Lihat* F. van Lith, *op cit.*, hlm 289-290, 329-330

18 *Lihat* F. van Lith, "Over Javaansche Bedienden en Doerians," dalam *ANPJ*, Archief Claverbond, Dossier 2, bundel 9; „De politiek ... " hlm. 328; "Over het regeringsvoorstel herziening," [hlm. 49].

19 F. van Lith, "De politiek ...," hlm. 296.

20 *Ibidem*, hlm. 327-328.

21 *Ibidem.*, hlm. 329-333.

22 Lihat F. van Lith, "Leeren uit de Filippijnen," hlm. 30-32.

23 F. van Lith, , "De politiek ...," hlm. 341; "Over het regeringsvoorstel herziening," [hlm. 48].

24 *Bdk.* F. van Lith, "Leeren uit de Filippijnen," hlm. 16-34.

25 F. van Lith, "Leeren uit de Filippijnen," hlm. 31.

26 Surat P.J.W. Muller kepada Pater Provinsial [C. Raaijmakers]. Bandung, 27 Pebruari 1923. *ANPJ*, Map 168, fasc. II, no. 10; J. van Rijckevorsel kepada Pater Provinsial (dengan lampiran untuk Romo van Lith). Weltevreden, 3 Pebruari 1923. *Ibidem.*, Map 168, fasc. VI, no. 10.

27 Surat J. van Rijckevorsel kepada Pater Provinsial [C. Raaijmakers]. Weltevreden, 19 Maret 1923. *Ibidem.*, Map 168, fasc. VI, no. 14.

DAFTAR PUSTAKA

Adisubrata, Y. (ed.)
1980 *I.J. Kasimo. Hidup dan Perjuangannya,* Jakarta, Gramedia.

Bloch, Ernst
1986 *Law and Human Dignity*, Massachusetts.

Cassesse, Antonio
1996 *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah,* Jakarta, Gramedia.

Hebrans, L.
1904 Decentralisatie in Nederlandsch-Indië, *Studiën* 37/63, 63-81.

Lademacher, Horst
1993 *Geschiedenis van Nederland,* Utrecht.

Lith, F. van
1922 De politiek van Nederland ten opzichte van Nederlandsch-Indië, *Studiën* 54/98, 280-297, 323-346.
1924 Het gebed van Ardjoena tot Ciwa, *Studiën* 56/101, 362-375.

Locher-Scholten, E.B.
1981 *Ethiek in fragmenten. Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische archipel 1877-1942,* Utrecht.

Nickel, James W.
1996 *Hak Asasi Manusia: Refleksi filosofis atas deklarasi universal hak asasi manusia,* Jakarta, Gramedia.

Pizzorni, Reginaldo
1978 *Il diritto naturale dalle origini a S. Tomasso d'Aquino,* Roma, Pontificia Università Lateranense.

Schmutzer, Eduard J.M.
1977 *Dutch Colonial Policy and the Search for Identity in Indonesia, 1920-1931,* Leiden, Brill.

Thayib, Anshari dkk. (ed.)
1997 *HAM dan Pluralisme Agama,* Jombang.

Welderen-Rengers, D.W. van
1947 *The Failure of a Liberal Colonial Policy,* The Hague.